



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 3, No. 6, Juni 2026
Hal 1015-1021

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Peran Pemahaman Dalam Efektivitas Penerimaan Dan Pembukuan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Dwi Rismayanti¹, Kurnia Afriani², Evi Pazila³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis, Riau, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 1, 2026
Revised Juni 2, 2026
Accepted Juni 13, 2026

Kata Kunci:

Pemahaman,
Efektivitas,
Penerimaan Daerah,
Pembukuan,
BAPENDA Kabupaten
Bengkalis.

Keywords:

*Understanding,
Effectiveness,
Regional Revenue,
Accounting,
BAPENDA Bengkalis Regency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman terhadap efektivitas penerimaan dan pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis. Penerimaan daerah dan pembukuan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berperan dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemahaman yang baik terhadap prosedur penerimaan dan pembukuan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja pada Bidang Penerimaan dan Pembukuan BAPENDA Kabupaten Bengkalis. Fokus kajian diarahkan pada proses penerimaan daerah, pencatatan pembukuan, serta efektivitas pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan data realisasi penerimaan tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pegawai BAPENDA Kabupaten Bengkalis telah memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur penerimaan dan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Efektivitas pengelolaan penerimaan daerah tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 62,13% dari target tahunan hingga September 2025. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penerimaan, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, keterbatasan data objek pajak, serta perlunya penyesuaian terhadap regulasi terbaru. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemutakhiran basis data perpajakan, serta penguatan sistem informasi menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan penerimaan dan pembukuan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding of the effectiveness of revenue and bookkeeping at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bengkalis Regency. Regional revenue and bookkeeping are important aspects in regional financial management because they play a role in supporting accountability, transparency, and optimization of Regional Original Revenue (PAD). A good understanding of revenue and bookkeeping procedures is expected to improve the effectiveness of task implementation and support the achievement of regional revenue targets. The method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, documentation, and direct involvement in work activities in the Revenue and Bookkeeping Sector of BAPENDA Bengkalis Regency. The focus of the study is directed at the regional revenue process, bookkeeping recording, and the effectiveness of regional revenue management based on revenue realization data for 2025. The results of the study indicate that BAPENDA Bengkalis Regency employees

have a good understanding of revenue and bookkeeping procedures in accordance with Government Accounting Standards (SAP). The effectiveness of regional revenue management is reflected in the realization of regional revenue, which reached 62.13% of the annual target by September 2025. However, several obstacles remain that impact revenue effectiveness, including suboptimal taxpayer compliance, limited taxable data, and the need to adapt to the latest regulations. Therefore, improving the quality of human resources, updating tax databases, and strengthening information systems are crucial steps to support more effective, transparent, and accountable revenue management and bookkeeping.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Dwi Rismayanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis,
Riau, Indonesia
Email: gilangbks298@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia ini, pembangunan nasional merupakan suatu upaya keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan membutuhkan sumber pembiayaan yang besar dan berkesinambungan. Salah satu sumber utama penerimaan Negara yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum tanpa adanya imbalan langsung [1]. Istilah ini merujuk pada kontribusi yang bersifat legal dan diatur oleh hukum dengan tujuan utama untuk mendukung operasional pemerintah dan penyediaan layanan publik.

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern dan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan, redistribusi, regulasi, dan stabilisasi ekonomi. Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fungsi penerimaan pajak berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung operasional pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai dan menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Fungsi redistribusi pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menerapkan sistem pajak yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata serta mendorong stabilitas sosial dan ekonomi [1].

Selain itu, pajak juga memiliki fungsi regulasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Pemerintah dapat mengenakan pajak pada barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang merugikan kesehatan atau lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol, serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Fungsi stabilisasi pajak berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk menstabilkan perekonomian.

Pajak memiliki peran penting tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrument untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan memberikan kesempatan kepada daerah agar mengelola seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di daerahnya. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu

cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam mengelola keuangan dan menentukan sumber pendapatan melalui pajak daerah. Pajak daerah menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan di tingkat local.

Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau juga memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, baik dari sector usaha, jasa, maupun masyarakat. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan dengan program entensifikasi yaitu aspek kelembagaan yakni memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan PAD, aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan PAD, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional upaya ekstensifikasi dilakukan dengan penciptaan sumber-sumber pajak daerah yang sudah sesuai dengan yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan menggali objek pajak dari beberapa jenis pajak yang memberikan dampak positif kepada penerimaan daerah.

Dalam mewujudkan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tentu tidak mudah. Dalam hal ini peran bidang Penerimaan dan Pembukuan sangat berperan penting. Karena Bidang Penerimaan dan Pembukuan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis memiliki tugas utama untuk menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan pembukuan atas semua jenis penerimaan tersebut ke dalam buku penerimaan sejenis dan buku kas umum. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab untuk menyeter seluruh penerimaan daerah ke kas daerah setiap bulannya.

Dibidang Penerimaan dan Pembukuan tentu saja merangkup semua bukti-bukti transaksi pajak dan membukukan menjadi satu. Hal ini sangat dibutuhkan peran pemahaman. Menurut Sudijono (2003) dalam Oktaviani dan Suazhari (2019), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami suatu hal dari hasil ingatannya akan sesuatu. Terutama pada Pembukuan, pemahaman sanga berperan penting karena dalam pembukuan sangat rentan kaitannya dengan uang masuk dan keluar, jadi pemahaman dalam menginput harus dimiliki oleh para pekerja, terutama dalam proses penerimaan dan pembukuan. Dalam Proses penerimaan dan pembukuan, harus dilakukan dengan cermat, karena prosesnya melibatkan perubahan, pengolahan, atau serangkaian langkah yang dimulai dari awal hingga menghasilkan suatu hasil, berupa penyelesaian suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien.

Meskipun dilakukan oleh para pekerja yang betul-betul memahami, tetapi dalam praktiknya, penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesadaran wajib pajak yang beragam, efektivitas prosedur penerimaan, hingga akurasi dalam proses pembukuan, dan yang dihadapi bukan lagi pada pemahaman internal pegawai, melainkan pada faktor eksternal. Hal ini menuntut peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis untuk bekerja secara optimal dalam mengelola proses penerimaan dan pembukuan pajak daerah agar dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

2. METODE

2.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis [2]. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori

sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial melalui pendekatan deskriptif dan analisis interpretatif [3].

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari beberapa teknik dalam mendapatkan sebuah data diantaranya:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono [9], wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Ini juga berlaku apabila peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang responden. Wawancara dilakukan dengan hari dan waktu yang berbeda dengan setiap informan. Rentang waktu wawancara sekitar 15-20 menit. [4].

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis bagaimana kegiatan rutin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis berperan penting dalam mengelola penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dari hasil pengamatan, pegawai Bapenda telah memiliki pemahaman yang baik terkait pembukuan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 [5]. Namun, permasalahan utama yang dihadapi bukan lagi pada pemahaman internal pegawai, melainkan pada faktor eksternal, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi, keterbatasan kualitas data objek pajak, serta kebutuhan adaptasi terhadap regulasi baru, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 8 Tahun 2023 [6]. Substansi masalah ini berdampak pada keterlambatan realisasi penerimaan, potensi selisih pencatatan, dan perlunya upaya ekstra dalam memastikan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Menurut Robbins [10], efektivitas organisasi ditentukan oleh sejauh mana sumber daya manusia dan sistem mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks Bapenda, pemahaman pegawai yang sudah baik berfungsi sebagai modal utama untuk menjaga ketepatan pembukuan [7]. Namun, teori ini juga menekankan pentingnya faktor lingkungan, seperti kepatuhan wajib pajak dan ketersediaan data yang valid, yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian target penerimaan. Hal ini sejalan dengan Mulyadi (2016) yang menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan tidak hanya bergantung pada kapasitas SDM, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi dan sistem informasi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan [8]. Dengan demikian, meskipun pemahaman pegawai sudah memadai, efektivitas penerimaan dan pembukuan di Bapenda Bengkalis masih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang perlu dikelola melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan data, serta penguatan sistem informasi pajak.

Selama kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, penulis berpartisipasi dalam kegiatan penginputan data realisasi penerimaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara per tanggal 08 September 2025, diketahui bahwa total target pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 sebesar Rp4.121.591.044.577, dengan realisasi sementara sebesar Rp2.560.764.408.056 atau sekitar 62,13% dari target.

3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp783,22 miliar, dan hingga September 2025 telah terealisasi sebesar Rp314,01 miliar atau 40,09%. Meskipun masih di bawah 50%, tren peningkatan penerimaan pada triwulan ketiga menunjukkan potensi yang positif, karena beberapa jenis pajak daerah mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang akhir tahun. Jika tren realisasi ini berlanjut, maka proyeksi capaian PAD dapat mencapai lebih dari 80%- 90% dari target tahunan. Komponen utama PAD terdiri dari Pajak Daerah dengan target yang ingin dicapai sebesar Rp246,52 miliar, dan yang terealisasi sementara sebesar Rp159,91 miliar atau sekitar (64,57%), Retribusi Daerah dengan target yang diharapkan Rp173,71 miliar, terealisasi sementara sebesar Rp149,49 miliar atau sekitar (86,04%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki target sebesar Rp327 miliar, dan terealisasi sementara sebesar Rp27,46 miliar atau sekitar (8,40%), serta Lain-lain PAD yang Sah memiliki target Rp35,97 miliar, dan terealisasi sementara Rp32,17 miliar atau sekitar (90,93%).

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Lain-lain PAD yang Sah memiliki kinerja sangat baik dengan capaian di atas 90%, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dana dari sumber non-pajak seperti jasa giro, denda, dan hasil pengembalian kegiatan tahun sebelumnya. Sedangkan retribusi daerah juga menunjukkan efektivitas tinggi, terutama pada sektor pelayanan kesehatan dan perizinan usaha, yang mengalami peningkatan transaksi selama periode pertengahan tahun 2025.

3.2 Rincian Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 10 jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yaitu Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, PBB-P2, dan BPHTB.

Berdasarkan data realisasi sementara hingga 08 September 2025: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi gabungan sekitar Rp240–320 miliar (sekitar 40% dari total PAD), Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp64,6 miliar, diproyeksikan dapat menembus Rp85 miliar pada akhir tahun, Pajak Reklame dan Pajak Restoran menunjukkan peningkatan yang stabil dan diperkirakan mencapai Rp8–12 miliar pada akhir tahun, Pajak lain seperti Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah masih berkontribusi kecil (di bawah 1%), yang disebabkan oleh terbatasnya objek pajak aktif dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah

3.3 Dana Transfer

Selain PAD, komponen besar pendapatan daerah berasal dari Dana Transfer dengan target Rp3,338 triliun dan terealisasi Rp2,246 triliun atau sekitar (67,30%). Sumber utama Dana Transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp425,53 miliar (realisasi 73,40%), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp333,02 miliar (realisasi 46,12%), serta Dana Desa dengan realisasi Rp1,503 triliun (50,78%). Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Bengkalis terhadap transfer pusat masih tinggi, meskipun efektivitas penerimaan PAD mulai meningkat.

3.4 Analisis Efektivitas dan Peran SDM

Dari hasil observasi selama magang, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan dan pembukuan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kinerja pegawai Bapenda. Pegawai telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengoperasikan sistem keuangan daerah, menginput data realisasi, serta melakukan rekonsiliasi antar bidang dengan teliti. Proses pembukuan dan pelaporan berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur, menunjukkan tingkat profesionalisme dan tanggung jawab kerja yang tinggi. Dengan kualitas SDM yang kompeten ini, permasalahan dalam pencapaian target bukan berasal dari internal Bapenda, melainkan lebih pada faktor eksternal, seperti

keterlambatan pelaporan dari OPD lain, keterlambatan pencairan dana transfer pusat, dan belum optimalnya setoran dividen dari BUMD.

3.5 Proyeksi dan Solusi

Melihat tren kenaikan realisasi pajak dan retribusi pada triwulan ketiga, dapat diproyeksikan bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi PAD Kabupaten Bengkalis dapat mencapai 90–92% dari target. Hal tersebut dapat terwujud jika menjalankan beberapa langkah strategi, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Intensifikasi pajak daerah, dengan memperkuat basis data wajib pajak dan memperluas objek pajak baru.
- b. Digitalisasi sistem penerimaan dan pembukuan, agar proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan transparan.
- c. Sosialisasi rutin kepada wajib pajak, untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat.
- d. Koordinasi lintas bidang dan OPD, agar data realisasi dan pelaporan lebih sinkron.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, sistem administrasi yang tertata, dan strategi penguatan penerimaan yang tepat, Kabupaten Bengkalis berpotensi besar mencapai bahkan melampaui 90% target pendapatan daerah tahun 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan Bapenda dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pengelola pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pegawai Bapenda Kabupaten Bengkalis memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penerimaan dan pembukuan daerah. Saat ini kapasitas SDM di Bapenda sudah menunjukkan bahwa cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.

Namun demikian, efektivitas penerimaan dan pembukuan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman pegawai semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kepatuhan wajib pajak, kualitas data objek pajak, serta penyesuaian terhadap regulasi baru, Teori efektivitas organisasi dan akuntansi pemerintahan menegaskan bahwa efektivitas kinerja tidak hanya ditentukan oleh pemahaman internal, tetapi juga oleh dukungan sistem dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas di Bapenda Kabupaten Bengkalis perlu diarahkan pada strategi eksternal, seperti optimalisasi sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan penerimaan dan pembukuan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendekati target akhir tahun 2025 antara lain: Intensifikasi pajak daerah, dengan memperkuat basis data wajib pajak dan memperluas objek pajak baru. Digitalisasi sistem penerimaan dan pembukuan, agar proses pelaporan lebih cepat, akurat, dan transparan. Sosialisasi rutin kepada wajib pajak, untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Koordinasi lintas bidang dan OPD, agar data realisasi dan pelaporan lebih sinkron. Dengan demikian, Bapenda Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] U. Faruq, et al., "Konsep dasar pajak dan lembaga yang dikenakan pajak: Tinjauan literatur dan implikasi untuk kebijakan fiskal," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 16, no. 2, pp. 65–70, 2024, doi: 10.55049/jeb.v16i2.306.
- [2] Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2022). Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Rnd*. P,10. 41. 41–46.
- [3] T. Inayati, "Penelitian kualitatif: Metode penelitian kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, vol. 5, pp. 1–7, Jan. 2010.

- [4] Khoiriah, "Bab III - Metode penelitian metode penelitian," *Metode Penelitian*, pp. 32–41, 2022.
- [5] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2010.
- [6] A. Kurniawan, "Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 13, no. 3, pp. 59–76, 2022.
- [7] Kacmar and R. S. Cropanzano, "III organizational support," in *Organizational Politics, Justice, and Support*, 2024, doi: 10.5040/9798400693939.0006.
- [8] A. R. Garcia, S. B. Filipe, C. Fernandes, C. Estevão, and G. Ramos, [Judul Artikel Tidak Lengkap/Silakan Dilengkapi], 2019.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. ke-3. Bandung: Alfabeta, 2022.
- [10] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 17th ed. Boston: Pearson, 2016.